



PEMPROV SULTENG
BRIDA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BRIDA DALAM ANGKA 2025





TIM PENYUSUN

Pembina

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penanggung Jawab

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si

(KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH)

Editor

AGUSTIN M. TOBONDO, SE., MM

(SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH)

HASIM R, S.Kom., M.Si

(Kepala Bidang Riset Inovasi dan Teknologi Daerah)

ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si

(Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah)

M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi., M.Sc

(Kepala Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah)

Pengolah Data

Andri K. Paiman, ST

Imam Fauzan, S.H





KATA PENGANTAR

Buku BRIDA Dalam Angka Tahun 2025 merupakan terbitan pertama sejak Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Buku BRIDA Dalam Angka Tahun 2025 ini merupakan sebagian catatan hasil kerja Badan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2024. Maksud dan tujuan diterbitkannya Buku BRIDA Dalam Angka ini yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Riset dan Inovasi yang meliputi perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah.

Semoga Buku BRIDA Dalam Angka Tahun 2025 ini bisa menjadi referensi dalam kegiatan Riset dan Inovasi untuk memenuhi kebutuhan data baik oleh instansi pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat.

Palu, 1 Mei 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah,

FARIDAH LAMARAUNA, SE.,M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 1999203 2 006





DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
A. Tugas dan Fungsi	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Visi dan Misi	7
D. Alamat Kantor	8
DATA KESEKRETARIATAN	8
1. DATA PEGAWAI	8
- Data ASN dan PPPK berdasarkan jenis kelamin	8
- Data ASN dan PPPK berdasarkan pendidikan	8
- Data ASN dan PPPK berdasarkan golongan	9
- Data ASN dan PPPK berdasarkan jabatan	10
- Data Non ASN	11
2. DATA ASET	11
- Data aset berdasarkan kategori	11
- Data aset tidak berwujud	12





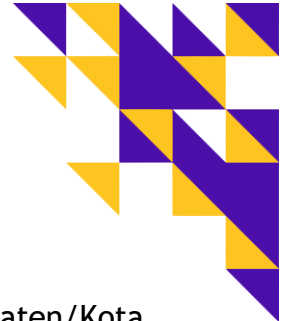
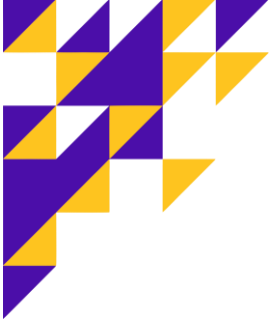
- Data peralatan dan mesin	13
- Majalah BRIDA	15
BAB III DATA KAJIAN DAN KEGIATAN TAHUN 2024	16
1. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah	16
2. Bidang Pemanfaatan Fasilitas dan Inovasi Daerah	19
3. Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah	23
4. Bidang Riset Inovasi dan Teknologi Daerah	26
Data Inovasi Berdasarkan Kategori Inovator	31
BAB IV PELAKSANAAN INDIKATOR UTAMA BRIDA (IKU) BRIDA	32
1 Indeks Inovasi Daerah (IID)	32
Penganugerahan Inovasi Daerah	32
Rekapitulasi Kinerja Pengelolaan Inovasi Daerah Tahun 2024.....	33
Rekapitulasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah	33
Rekapitulasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	33
Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per OPD (Inovator)	34
Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per Pimpinan OPD (Inovator)	34
Rekapitulasi Jumlah Usul Inovasi Daerah Per OPD	35
Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per ASN (Inovator)	35
Rekapitulasi usul IID berdasarkan inisiator	36
Rekapitulasi usul IID berdasarkan bentuk	36
Rekapitulasi usul IID berdasarkan jenis	36
Rekapitulasi usul IID berdasarkan tahapan	36
Rekapitulasi skor IID Provinsi Se-Sulawesi	37
Rekapitulasi skor IID Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah	37





Rekapitulasi skor kematangan Inovasi Daerah Sulteng 2021 - 2024	38
Rekapitulasi usul Inovasi Daerah per Tahapan	38
Rekapitulasi usul “Penerapan” Inovasi Daerah yang diteruskan ke BSKDN Kemendagri di Aplikasi IGA	39
Daftar nominatif usul inovasi daerah tahapan inisiatif	39
Daftar nominatif usul inovasi daerah untuk tahapan Uji coba	40
Daftar nominatif usul Inovasi Daerah untuk Tahapan Penerapan	40
Daftar nominatif usul Inovasi Daerah untuk tahapan penerapan yang diteruskan BSKDN KEMENDAGRI melalui Aplikasi IG	42
Daftar penerima penghargaan inovasi daerah Melalui kegiatan BRIDA Innovation Week Tahun 2024	43
Kategori ASN Terinovatif	43
Kategori Pimpinan Perangkat Daerah Terinovatif	43
Kategori Perangkat Daerah Terinovatif	43
Daftar penerima penghargaan berdasarkan nilai tertinggi Indeks kematangan inovasi daerah pemerintah daerah Kab/kota Se-Sulawesi tengah tahun 2024	44
2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	45
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah IDSD	45
Indikator Setiap Pilar dalam Indeks daya saing daerah (IDSD)	46
Skor IDSD 2024 secara Nasional & Regional Se-Sulawesi	48
Skor IDSD 2024 Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah	49



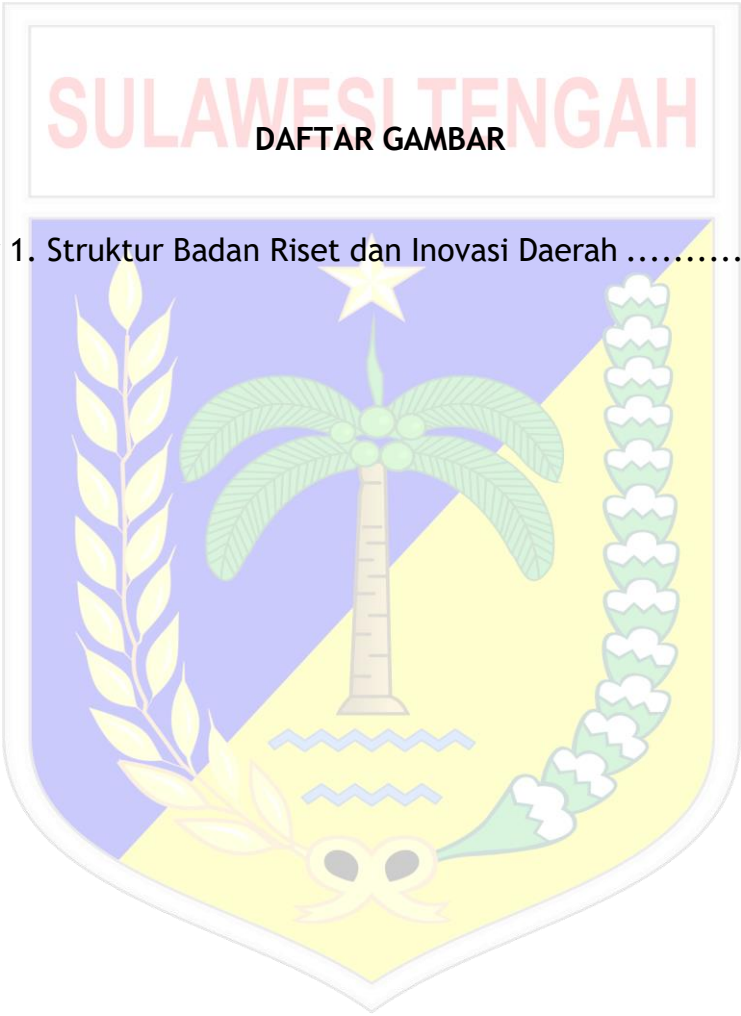


Capaian Skor IDSD 2023-2024 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	50
Skor IDSD Tahun 2023 - 2024 Provinsi Sulawesi Tengah	52
Persandingan IDSD 2022 - 2024 Provinsi Sulawesi Tengah.....	53
BAB V PENUTUP	54

SULAWESI TENGAH

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah	6
--	---





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dilandasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a) Pasal 219 menyebutkan bahwa “Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penelitian dan pengembangan”
 - b) Pasal 386 menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan :
 - a) pasal 4 menyatakan bahwa “Inovasi Daerah Berbentuk” :
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b) pasal 32 Menyatakan” :
 - 1) ayat (1) : “Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah”
 - 2) ayat (2) : Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah”



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional :
- a. pasal 3 menyebutkan : “Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yg terintegrasi di daerah “.
 - b. pasal 66 menyatakan bahwa: “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. pasal 67 menyatakan bahwa: ”BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila”.
 - d. pasal 68 menyatakan bahwa : “Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) :
 - 1) pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan pembinaan;
 - 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem Iptek di daerah;
 - 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis LITBANGJIRAP IPTEK;

7) Koordinasi sistem IPTEK daerah.

Mencermati akan beberapa ketentuan di atas, maka orientasi pelayanan BRIDA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi :

peran awal → input penyusunan kebijakan berbasis kelitbangan
peran antara → katalisator pencapaian target sasaran pembangunan
peran akhir → monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

B. Tujuan

Tujuan disusunnya buku Brida Dalam Angka Tahun 2025 ini untuk memberikan informasi data statistik Tahun 2024 yang merupakan pencapaian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.



BAB II GAMBARAN UMUM

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Adapun fungsinya adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- c. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah

Adapun Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;



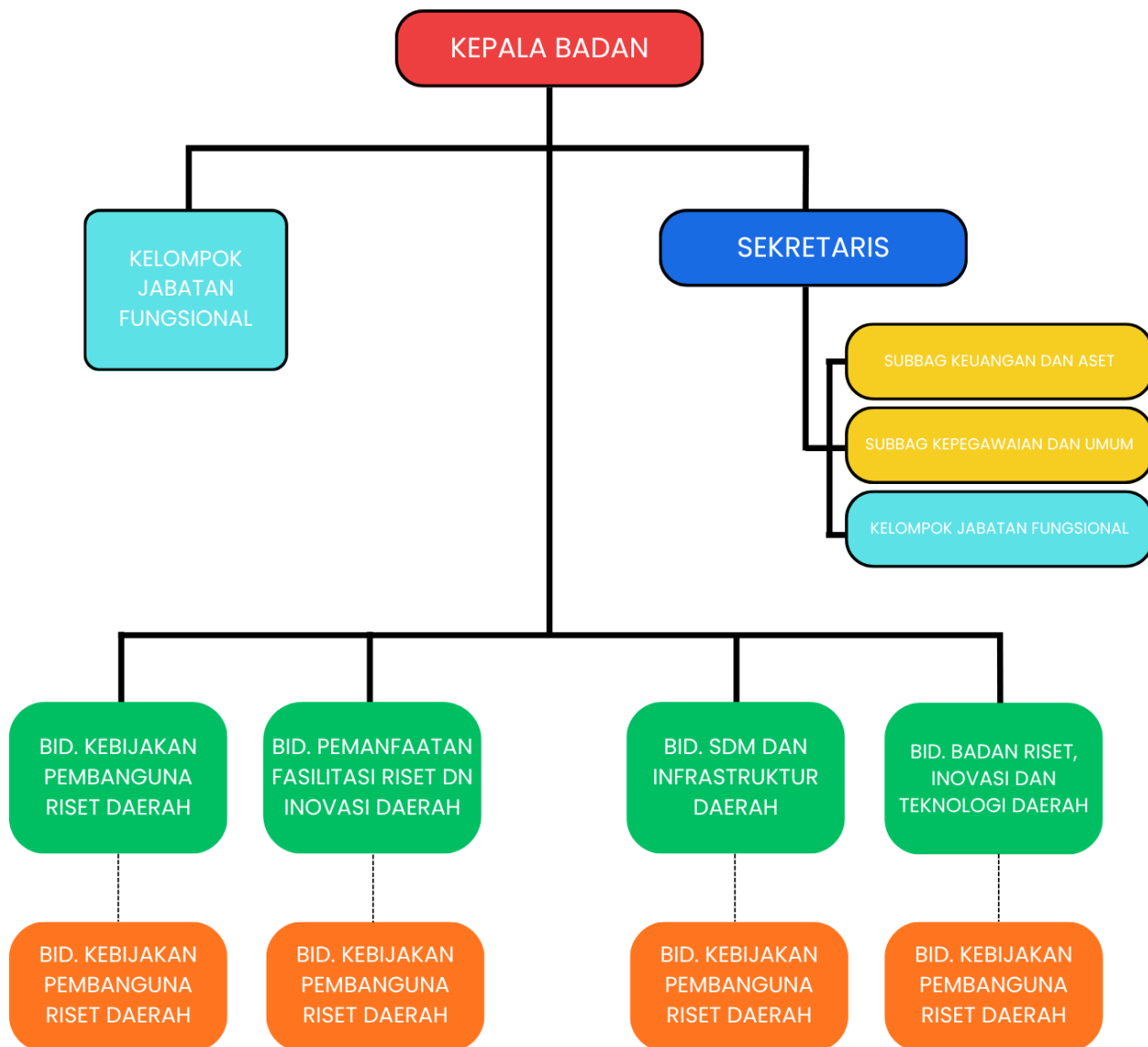
3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
- d. Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
- e. Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah
- f. Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah





STRUKTUR ORGANISASI BRIDA PROV. SULTENG



Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah

1. Perda No 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Provinsi;
2. Pergub Sulteng No 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi serta Tata Kerja PD



C. Visi dan Misi

Visi Abadi Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah diterjemahkan ke dalam Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu menjadi jembatan dalam penyelenggaraan pembangunannya. Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2045, dalam tahap awal periode 2025-2029, Sulawesi Tengah perlu membenahi dan melakukan perkuatan fondasi, hingga nantinya dapat dilanjutkan pada tahapan akselerasi transformasi dan ekspansi global di segala bidang pada akhir periode hingga terwujudnya Sulawesi Tengah Emas di Tahun 2045.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025 - 2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan Pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 adalah

“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Berangkat dari hal di atas, maka harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

“ Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029 ”



D. Alamat Kantor

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Terletak di Jln. Garuda Nomor 30 A Palu kecamatan Mantikolulore kelurahan Tanamodindi dengan luas bangunan ± 4.240 m2 kota Palu.

DATA KESEKRETARIATAN

DATA ASN DAN PPPK BRIDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	37
2	PEREMPUAN	38
	JUMLAH	75

Sumber : Data BRIDA 2025

Tabel diatas menunjukkan data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Brida berdasarkan jenis kelamin, yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. Secara keseluruhan, jumlah total pegawai Adalah 75 orang. Data ini dapat digunakan untuk melihat proporsi keterlibatan berdasarkan gender dalam suatu kegiatan atau kelompok tertentu.

DATA ASN DAN PPPK BRIDA BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	16	6	16
4	D3	0	3	3
5	D4	0	0	0
6	S1	17	21	38
7	S2	10	8	18
8	S3	0	0	0
	JUMLAH	37	38	75

Sumber : Data BRIDA 2025

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di BRIDA menunjukkan sebaran tingkat pendidikan yang beragam. Dari total 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagian besar memiliki pendidikan terakhir pada jenjang S2, yakni sebanyak 18 orang (10 laki-laki dan 8 perempuan). Selanjutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan pendidikan S1 sebanyak 38 orang (17 laki-laki dan 21 perempuan). pendidikan D3 sebanyak 3 orang (0 laki-laki dan 3 perempuan). pendidikan SLTA sebanyak 16 orang (10 laki-laki dan 6 perempuan). Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan latar belakang pendidikan SLTP tidak ada, sementara tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berpendidikan SD , D4, maupun S3. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) BRIDA memiliki latar belakang pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang sarjana (S1).

DATA ASN DAN PPPK BRIDA BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	IV	7	4	11
2	III	12	15	27
3	II	7	4	11
4	I	0	0	0
5	X	2	1	3
6	IX	8	12	20
5	V	1	2	3
JUMLAH		37	38	75

Sumber : Data BRIDA 2025

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di BRIDA sebanyak 75 orang, Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berada pada Golongan III sebanyak 27 orang, disusul Golongan IV sebanyak 11 orang. Golongan II terdiri dari 11 orang, sementara Golongan I tidak ada, Golongan V

terdiri dari 3 orang, Golongan IX terdiri dari 20 orang, dan Golongan X terdiri dari 3 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) BRIDA berada pada jenjang kepangkatan Golongan III dan tidak memiliki kepangkatan Golongan I.

DATA ASN DAN PPPK BRIDA BERDASARKAN JABATAN

NO.	USIA	L	P	JUMLAH
1	KEPALA BADAN	0	0	0
2	SEKRETARIS	0	1	1
3	KEPALA BIDANG	2	1	3
4	KASUBAG KEPEGAWAIAN	1	0	1
5	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET	0	1	1
6	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	8	8	16
7	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3	3
8	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	8	6	14
9	OPERATOR LAYANAN	2	0	2
10	PERENCANA	1	0	1
11	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK	5	2	7
12	PENELITI	2	4	6
13	PRANATA KOMPUTER	2	1	3
14	ANALIS SDM APARATUR	0	3	3
15	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	6	8	14
	JUMLAH	37	38	75

Sumber : Data BRIDA 2025

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di BRIDA sebanyak 75 orang, tersebar dalam berbagai jabatan struktural maupun fungsional. Jabatan terbanyak diisi oleh Penelaah Teknis Kebijakan sebanyak 16 orang, diikuti oleh administrasi perkantoran sebanyak 14 orang dan penata layanan operasional sebanyak 14 orang, Peneliti sebanyak 6 orang, pranata komputer 3 orang, serta perencana 1 orang. Operator layanan sebanyak 2 orang, pengolah data dan informasi sebanyak 3 orang, dan analisis SDM aparatur sebanyak 3 orang. Posisi pimpinan seperti Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang masing-masing diisi oleh 1 orang. Beberapa jabatan

administratif lainnya seperti Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan juga memiliki keterwakilan, menunjukkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang beragam sesuai kebutuhan organisasi.

DATA NON ASN BRIDA

NO.	JABATAN	L	P	JUMLAH
1	Tenaga Kerja dengan Perjanjian	14	11	25
2	Tenaga Kerja Out Sourcing	0	0	0
	JUMLAH	14	11	25

Sumber : Data BRIDA 2025

Jumlah pegawai non ASN di BRIDA berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan kualifikasi Pendidikan 5 (lima) orang Sarjana (S1) dan 20 (dua puluh) orang SLTA.

DATA ASET BERDASARKAN KATEGORI

NO.	KATEGORI ASET	JUMLAH	LUAS
1	TANAH	1	4.260 M ²
2	PERALATAN DAN MESIN (Alat Bengkel)	58	Buah
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	120 M ²
	b. Bangunan Laboratorium Permanen	1	108 M ²
	c. Bangunan Laboratorium Semi Permanen	1	23 M ²
	d. Bangunan Tempat Ibadah/Masjid	1	64 M ²
	e. Gedung Olahraga permanen	1	219 M ²
	f. Pos Jaga Permanen	1	6 M ²
	g. Bangunan tempat kerja lainnya (jalan)	1	200 M ²
4	ASET LAIN-LAIN (Rangka Spanduk Baliho)	1	3x4 M ²
5	ASET TAK BERWUJUD (instalasi Air Tanah Dangkal)	2	3 M ²
	JUMLAH	69	Unit

Sumber : Data BRIDA 2025

Data aset menunjukkan bahwa dari berbagai kategori aset, yang tercatat secara kuantitatif adalah Luas Tanah 4.260 M² Peralatan alat bengkel sebanyak 58 Buah, Gedung dan Bangunan antara lain, Bangunan Gudang terbuka permanen 1 unit, Bangunan Laboratorium Permanen 1 Unit, Bangunan Laboratorium semi permanen 1 unit, Bangunan tempat ibadah/masjid 1 unit, Gedung olahraga permanen 1 unit, Pos jaga permanen 1 unit, serta aset lain-lain (rangka spanduk baliho) 2 unit, dan aset tak berwujud seperti instalasi air tanah dangkal 2 unit. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan aset yang paling dominan saat ini berada pada kategori peralatan dan mesin.

DATA ASET ASET TIDAK BERWUJUD		
NO.	JENIS ASET TAK BERWUJUD	JUMLAH
1	Aplikasi	3
JUMLAH		3

Sumber : Data BRIDA 2025

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 3 (tiga) jenis aplikasi sebagai sarana pendukung layanan. Aplikasi tersebut diantaranya: web Brida merupakan sarana pendukung pelayanan terkait peningkatan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik serta administrasi pemerintahan, dengan menyediakan akses informasi dan layanan yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat dan aparatur negara, sekaligus memfasilitasi akuntabilitas dan partisipasi public; Aplikasi e-jurnal Bomba adalah menjadi media diseminasi atau penyebaran hasil-hasil penelitian dan kajian di bidang pembangunan daerah, yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BRIDA Sulteng) secara berkala, sehingga dapat menjadi acuan dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan; Aplikasi Si-AKIP BRIDA yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dokumen hasil revidu dan mengevaluasi kinerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



DATA ASET
PERALATAN DAN MESIN

NO.	JENIS PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH
1	A.C. Split	41
2	BRACKET STAND TELEVISI / STAND BRACKET TELEVISI MODEL AVA	5
3	Amplifier	2
4	Audio Mixing Console	1
5	Camera Canon	2
6	CCTV	2
7	Filing Cabinet Besi	4
8	Filing Cabinet Besi / Almari Besi	4
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20
10	Kursi Putar	100
11	Kursi Rapat	74
12	Lap Top	37
13	LCD Projector/Infocus	6
14	Lemari Kayu	5
15	Loudspeaker	4
16	Meja Kerja Kayu	86
17	Meja Kerja Pejabat lain-lain	5
18	Meja Panjang	5
19	Meja Rapat	33
20	Meja Rapat Pejabat lainnya	1
21	Meja Resepsionis	1
22	Microphone/Wireless MIC	7
23	P.C Unit	36
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40
25	Mesin Vacum Cleaner	2
26	Televisi	8



27	UPS	33
28	Hardisk	15
29	Rak Besi	4
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
31	Sepeda Motor	17
32	Sofa	8
33	Mobil	7
34	Motor Roda 3	1
35	Mesin Pemotong Rumput	1
36	AC Standing	8
37	Meja Bundar	4
38	Alat Olahraga (Treatmentmill)	2
39	Orgen/Elektron	1
JUMLAH		634

Sumber : Data BRIDA 2025

Kategori aset Peralatan dan Mesin mencatat total 634 unit yang terdiri dari berbagai jenis perlengkapan operasional kantor dan pendukung kegiatan. Beberapa aset dengan jumlah terbanyak meliputi Kursi Rapat sebanyak 100 unit, Meja Kerja 86 unit, Kursi Putar 74 unit, dan Laptop sebanyak 37 unit. Selain itu, terdapat juga perangkat teknologi seperti PC Unit (36 unit), Printer (40 unit), serta perangkat Camera Canon dan Audio Mixing Console. Aset transportasi tercatat berupa Sepeda Motor sebanyak 17 unit dan mobil 7 unit. Data ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam mendukung kegiatan administrasi dan operasional instansi.



MAJALAH BRIDA TAHUN 2024

NO.	JENIS	JUMLAH
1	MAJALAH BRIDA (EDISI JANUARI - DESEMBER 2024)	1 Edisi
JUMLAH		1

Sumber : Data BRIDA 2025

Majalah BRIDA yang terbit edisi Januari - Desember Tahun 2024 merujuk pada publikasi berkala diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai media untuk menyampaikan hasil penelitian, kegiatan, inovasi, dan sebagainya.



BAB III DATA KAJIAN DAN KEGIATAN TAHUN 2024

1. BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH

Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah umumnya merujuk pada lingkup tugas dan fungsi yang terkait dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan riset serta inovasi di tingkat daerah.

Berikut cakupan bidangnya:

1. Perumusan Kebijakan
 - Menyusun kebijakan strategis pembangunan riset dan inovasi sesuai kebutuhan daerah.
 - Mengintegrasikan riset daerah dengan **RPJMD**, **RPJPD**, dan kebijakan pembangunan nasional.
 - Menetapkan prioritas riset unggulan daerah sesuai potensi lokal.
2. Perencanaan dan Program
 - Menyusun **agenda riset daerah** yang mendukung pemecahan masalah pembangunan.
 - Merancang program penguatan kapasitas SDM IPTEK dan inovasi.
 - Mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat (**Quadruple Helix**).
3. Implementasi Kebijakan
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di daerah.
 - Mendukung pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 - Fasilitasi inkubasi inovasi, hilirisasi riset, dan kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga riset.
4. Pemantauan dan Evaluasi
 - Melakukan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan riset dan inovasi.
 - Menilai dampak riset terhadap pembangunan daerah (ekonomi, sosial, lingkungan).

- Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan riset dan inovasi.
5. Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Riset
- Pengembangan sarana prasarana riset daerah.
 - Penguatan jejaring dan ekosistem inovasi (pusat riset, science techno park, laboratorium).
 - Peningkatan literasi IPTEK di masyarakat.

DATA KAJIAN
BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH TAHUN 2024

NO.	KAJIAN / KEGIATAN	JUMLAH
1	Pembentukan Persiapan dan Pengawasan Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kab Donggala	1
2	Pembentukan Persiapan dan Pengawasan Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kab Banggai	1
3	Pembentukan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2024	1
4	Pembentukan Penguatan dan Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah	1
JUMLAH		4

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 4 kajian/Kegiatan Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah telah dilaksanakan, terdiri dari ; Pembentukan Persiapan dan Pengawasan Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kab Donggala 1 (satu) kajian, Pembentukan Persiapan dan Pengawasan Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kab Banggai 1 (satu) kajian, Pembentukan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2024 1 (satu) kajian, Pembentukan Penguatan dan Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing

Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) kajian, Komposisi ini mencerminkan arah strategis kajian yang lebih condong pada penguatan ekonomi dan pembangunan daerah.

POLICY BRIEF
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH TAHUN 2024

NO.	POLICY BRIEF	JUMLAH
1	POLICY BRIEF DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN BANGGAI	1
2	POLICY BRIEF DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN POSO	1
3	POLICY BRIEF IDSD 2024 PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
JUMLAH		3

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) *Policy Brief* yang dilaksanakan oleh Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah terkait inovasi.

Pertama *Policy Brief* Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Banggai Menjelaskan Penyusunan analisis kelayakan Pemekaran daerah Otonomi Baru Kabupaten-Kabupaten di Provinsi merupakan tindak lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju ”yang diejawantakan dalam Misi 9: Mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk Provinsi Sulawesi Tengah, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan DOB bagi daerah yang secara potensial dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new growth pole*) di Sulawesi Tengah.

Mendukung segera dibentuk Tim Percepatan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banggai yang diwakili oleh seluruh *stakeholder* dan Anggota DPRD yang berasal dari wilayah DOB Pemekaran;

Perlunya untuk menyiapkan dukungan sarana dan prasarana termasuk pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap percepatan pemekaran wilayah Kabupaten persiapan DOB Kabupaten Banggai;

Ke dua *Policy Brief* Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Poso menjelaskan Mendukung segera dibentuk Tim Percepatan Pemekaran Wilayah Kabupaten Poso yang diwakili oleh seluruh *stakholders* dan Anggota DPRD yang berasal dari wilayah DOB Pemekaran;

Ke tiga *Policy Brief* Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 Provinsi Sulawesi Tengah Tengah yang menjelaskan tentang kemampuan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. BIDANG PEMANFAATAN FASILITASI DAN INOVASI DAERAH

Bidang Pemanfaatan Fasilitasi dan Inovasi Daerah pada umumnya berhubungan dengan fungsi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang bertugas mendorong, memfasilitasi, dan memanfaatkan hasil riset maupun inovasi di daerah.

Bidang ini bisa dijelaskan dalam beberapa aspek:

1. Fungsi Utama

- Fasilitasi Inovasi: mendukung dan memfasilitasi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun perguruan tinggi dalam menghasilkan serta mengembangkan inovasi.
- Pemanfaatan Hasil Riset: memastikan riset yang dilakukan tidak berhenti di laporan, tetapi dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.
- Kemitraan dan Kolaborasi: menjalin kerjasama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, komunitas, dan pemerintah untuk mempercepat penerapan inovasi.

- Akselerasi Pembangunan Daerah: menggunakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Ruang Lingkup

- Identifikasi kebutuhan inovasi daerah sesuai prioritas pembangunan.
- Pengelolaan fasilitasi inovasi melalui program, kegiatan, dan dukungan regulasi.
- Diseminasi hasil riset dan inovasi agar dapat dimanfaatkan lebih luas.
- Pendampingan dan inkubasi inovasi bagi masyarakat, UMKM, maupun perangkat daerah.
- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi untuk memastikan keberlanjutan.

3. Contoh Program/Kegiatan

- Inkubasi bisnis berbasis inovasi daerah.
- Kompetisi inovasi pelayanan publik.
- Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi penemu/inovator lokal.
- Forum komunikasi riset dan inovasi daerah.
- Penerapan teknologi tepat guna di masyarakat.

DATA KAJIAN

BIDANG PEMANFAATAN FASILITASI DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024

NO.	KAJIAN / KEGIATAN	JUMLAH
1	Dampak pernikahan anak dan Upaya pencegahan Stunting melalui intervensi pendampingan Gizi dan Kesehatan di Kota Palu	1
2	Diseminasi Teknologi Ransum Pakan Kelor Mineral blok untuk ternak ruminansia Kabupaten Sigi	1
JUMLAH		2

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2 kajian/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Fasilitas dan Inovasi Daerah telah dilaksanakan, terdiri dari ; Dampak pernikahan anak dan Upaya pencegahan Stunting melalui intervensi pendampingan Gizi dan Kesehatan di Kota Palu 1 (satu) kajian, Diseminasi Teknologi Ransum Pakan Kelor Mineral blok untuk ternak ruminansia Kabupaten Sigi 1 (satu) kajian, Komposisi ini mencerminkan arah strategis kajian yang lebih condong pada penguatan ekonomi dan pembangunan daerah.

DATA LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) : OPD PENGUSUL BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
2	DESA PILOT PROJECT SIAP GENCAR DAN AMAN STUNTING : OPD PENGUSUL BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
3	TEKNOLOGI SAMPAH PLASTIK JADI BMM : OPD PENGUSUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
4	TOL'ALIMA (KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI KELIMA PASIEN PRIORITAS) : OPD PENGUSUL RS UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
5	SIKOLA-TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KOMPETENSI LULUSAN : OPD PENGUSUL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
6	SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN EVALUASI PERTANGGUNG JAWABAN KABUPATEN SE SULAWESI TENGAH (SIREVA) : OPD PENGUSUL BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
7	REKONSILIASI ONLINE PENYETORAN KAS NEGARA BERBASIS DATA VALID DAN TEPAT WAKTU (E-REAL DEPOSIT) : OPD PENGUSUL BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
8	PADUNGKU (PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTREM TURUN) : OPD PENGUSUL	1



	DINAS CIPTA KARYA SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	
9	APLIKASI SIMANIS “SISTEM INFORMASI MUTU RUMAH SAKIT” : OPD PENGUSUL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
10	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RUANG LAUT : OPD PENGUSUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
11	LABRIDA (LAMPU BAGAN PERANGKAP IKAN DENGAN SONAR) UPAYA PENGUATAN EKONOMI NELAYAN BAGAN BERBASIS ENERGI (TERBARUKAN) : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
12	INOVASI PEMBIBITAN KELAPA GENJAH RAJA DI SULAWESI TENGAH : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
13	INVESTASI DAN KEMISKINAN DI SULAWESI TENGAH : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
14	LUKISAN TAPAK TANGAN PRASEJARAH SUATU RISET SEJARAH DAN ANTROPOLOGI DI MOROWALI UTARA	1
15	MENGURAI DIMENSI, POTRET KEMISKINAN DAN STUNTING DI KABUPATEN SIGI : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
16	JALUR REMPAH SULAWESI TENGAH DAN ISLAM KOSMOPOLITAN (RISET ISLAM KOSMOPOLITAN IMAM SYA'BAN DI LOLANTANG BANGKEP SULAWESI TENGAH : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
17	BATAKO SLAG NIKEL : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
18	DESA PILOT PROJECT SIAP GENCAR DAN AMAN STUNTING : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
19	KELOR MINERAL BLOK (KMB) : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
20	OPTIMALISASI KEBIJAKAN VOKASI DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DI KABUPATEN MOROWALI UTARA : BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
JUMLAH		20

Sumber : Data BRIDA 2025



Total layanan yang tercatat berjumlah 20 Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Data ini mengacu pada upaya kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil-hasil riset dan inovasi daerah di Sulawesi Tengah. BRIDA Sulteng berperan dalam melindungi karya riset daerah melalui pendaftaran HKI dan berkolaborasi dengan Kemenkumham untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan fasilitasi pendaftaran HKI kepada masyarakat.

**DATA ARTIKEL JURNAL BOMBA
BERDASARKAN EDISI TERBIT**

NO.	EDISI TERBIT	JUMLAH
1	EDISI I (JANUARI - JUNI)	1
2	EDISI II (JULI - DESEMBER)	1
JUMLAH		2

Sumber : Data BRIDA 2025

Selama satu tahun, telah diterbitkan total 2 artikel yang terbagi merata dalam dua edisi. *Edisi 1 (Januari-Juni)* dan *Edisi 1 (Juli-Desember)* masing-masing memuat 1 artikel. Distribusi yang seimbang ini menunjukkan konsistensi dalam produksi dan publikasi jurnal bomba informatif sepanjang tahun, serta komitmen dalam menjaga kesinambungan penerbitan secara berkala.

3. BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Bidang ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah. Secara umum ruang lingkupnya dapat meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah

- **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi**

Melaksanakan pelatihan, pendidikan, serta pengembangan keahlian aparatur daerah maupun masyarakat.

- **Penguatan Kualitas SDM IPTEK**

Mendorong peningkatan literasi sains, teknologi, riset, dan inovasi untuk menunjang pembangunan.

- **Manajemen Kinerja dan Profesionalisme**

Menyusun standar kompetensi jabatan, sistem penilaian kinerja, serta peningkatan budaya kerja.

- **Pemberdayaan Masyarakat**

Membuka akses pada peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan inovasi lokal.

2. Infrastruktur Daerah

- **Pengembangan Infrastruktur Dasar**

Penyediaan sarana prasarana umum seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta transportasi publik.

- **Infrastruktur IPTEK dan Inovasi**

Pembangunan laboratorium, pusat riset, inkubator bisnis, dan fasilitas inovasi daerah.

- **Transformasi Digital dan Infrastruktur TIK**

Penguatan jaringan internet, pusat data daerah, serta layanan digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

- **Pemeliharaan dan Optimalisasi**

Perawatan serta pemanfaatan infrastruktur secara berkelanjutan agar mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Tujuan Utama

- Mewujudkan SDM daerah yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing.
- Menyediakan infrastruktur yang memadai, modern, dan berkelanjutan.
- Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

DATA KAJIAN
BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2024

NO.	KAJIAN / KEGIATAN	JUMLAH
1	PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM TEKNOLOGI PERIKANAN NELAYAN BADANG APUNG DI DESA SALUBOMBA KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA	1
2	PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN KELOR MINERAL BLOK (KMB) DIDESA SAMBO KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI	1
3	PELATIHAN TATA CARA PERBANYAKAN KELAPA GENJA VARIETAS RAJA DIDESA BINANGGA DAN DESA TULO KABUPATEN SIGI	1
4	PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN KELOR MINERAL BLOK (KMB) DI DESA LABUAN PANIMBA DAN DESA TOAYA KABUPATEN DONGGALA PROVINSI	1
JUMLAH		4

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 4 kajian/Kegiatan Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah telah dilaksanakan, terdiri dari ; Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM teknologi perikanan nelayan badang apung di desa Salubomba Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala 1 (satu) kajian, Pelatihan Pembuatan Pakan Kelor Mineral BLOK (KMB) didesa sambo kecamatan dolo selatan Kabupaten Sigi 1 (satu) kajian, Pelatihan tata cara perbanyak kelapa genja varietas raja didesa binangga dan desa tulo Kabupaten Sigi 1 (satu) kajian, dan pelatihan pembuatan pakan Kelor Mineral Blok (KMB) di desa labuan panimba dan desa toaya kabupaten donggala provinsi Komposisi ini mencerminkan arah strategis kajian yang lebih condong pada penguatan ekonomi dan pembangunan daerah.

4. BIDANG RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH

Bidang Riset Inovasi Dan Teknologi Daerah fokus utamanya adalah mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta pengembangan kebijakan daerah di Bidang Riset Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk pembangunan daerah.

1. Ruang lingkup tugas utamanya dapat mencakup:

- Perumusan kebijakan daerah dalam bidang riset, inovasi, dan teknologi.
- Pengembangan kapasitas riset dan inovasi yang relevan dengan potensi serta kebutuhan daerah.
- Fasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang riset dan inovasi.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing.
- Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi riset, inovasi, serta teknologi di daerah.
- Pengelolaan data, informasi, dan hasil riset agar bisa dimanfaatkan oleh stakeholder daerah.

2. Indikator keberhasilan biasanya terlihat dari:

- Jumlah riset yang sesuai kebutuhan daerah.
- Kualitas dan kuantitas inovasi daerah yang ditetapkan dalam Daftar Inovasi Daerah.
- Tingkat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- Jumlah kolaborasi riset dan inovasi antara pemda dengan pihak eksternal (universitas, industri, komunitas).
- Peningkatan daya saing daerah melalui penerapan hasil riset dan teknologi.



DATA RISET TAHUN 2024

NO.	BIDANG KAJIAN	JUMLAH
1	LABRIDA (LAMPU BAGAN PERANGKAP IKAN DENGAN SONAR) UPAYA PENGUATAN EKONOMI NELAYAN BAGAN BERBASIS ENERGI BARU TERBARUKAN	1
2	BATAKO SLAG NIKEL	1
3	MENGURAI DIMENSI DAN FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN STUNTING	1
4	JALUR REMPAH SULAWESI TENGAH DAN ISLAM KOSMOPOLITAN (RISET ISLAM KOSMOPOLITAN IMAM SYA'BAN DI DI LOLANTANG BANGKEP SULTENG)	1
5	LUKISAN TAPAK TANGAN PRASEJARAH: SUATU RISET SEJARAH DAN ANTROPOLOGI DI MOROWALI UTARA	1
6	PENGEMBANGAN METODE PENGENDALIAN KEONG INANG PERANTARA <i>SCHISTOSOMA JAPONICUM</i>	1
7	PERANCANGAN PLTS DI GEDUNG KANTOR BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
8	KAJIAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS BENIH UNTUK Mendukung Ketersediaan Benih Bermutu Bawang Lokal Sulawesi Tengah	1
9	INVESTASI DAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH: KAJIAN MAKRO EKONOMI	1
10	PENGARUH PEMANGKASAN PUCUK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PAPRIKA (<i>CAPSICUM ANNUM</i> VAR. <i>GROSSUM</i> L.)	1
11	KARAKTERISASI DAN PROPAGASI KULTIVAR LOKAL UNGGUL DURIAN (<i>DURIO ZIBETHINUS</i> MURR.) SULAWESI TENGAH	1
12	SKEMA KOLABORASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN GEOWISATA TAMAN BUMI PASIGALA	1
13	PEMETAAN DAN DESKRIPSI MEGALITIKUM DI KABUPATEN POSO	1
JUMLAH		13

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 13 kajian Riset Inovasi dan Teknologi telah dilaksanakan, terdiri dari Labrida (lampu bagan perangkap ikan dengan sonar) Upaya Penguatan Ekonomi Nelayan Bagan Berbasis Energi Baru Terbarukan 1 (satu) kajian, Batako Slag Nikel 1 (satu) kajian, Mengurai Dimensi Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Stunting 1 (satu) kajian, Jalur Rempah Sulawesi



Tengah Dan Islam Kosmopolitan (Riset Islam Kosmopolitan Imam Sya'ban Di Di Lolantang Bangkep Sulteng) 1 (satu) kajian, Lukisan Tapak Tangan Prasejarah: Suatu Riset Sejarah Dan Antropologi Di Morowali Utara 1 (satu) kajian, Pengembangan Metode Pengendalian Keong Inang Perantara *Schistosoma Japonicum* 1 (satu) kajian, Perancangan PLTS Di Gedung Kantor Brida Provinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) kajian, Kajian Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Benih Untuk Mendukung Ketersediaan Benih Bermutu Bawang Lokal Sulawesi Tengah 1 (satu) kajian, Investasi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah: Kajian Makro Ekonomi 1 (satu) kajian, Pengaruh Pemangkasan Pucuk Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Paprika (*Capsicum Annum* Var. *Grossum* L.) 1 (satu) kajian, Karakterisasi Dan Propagasi Kultivar Lokal Unggul Durian (*Durio Zibethinus* Murr.) Sulawesi Tengah 1 (satu) kajian, *Skema Kolaborasi Pengembangan dan Pengelolaan Geowisata Taman Bumi Pasigala* 1 (satu) kajian Pemetaan dan Deskripsi Megalitikum di Kabupaten Poso 1 (satu) kajian, Komposisi ini mencerminkan arah strategis kajian yang lebih condong pada penguatan ekonomi dan pembangunan daerah.

DATA POLICE BRIEF TAHUN 2024

NO.	BIDANG KAJIAN	JUMLAH
1	POLICY BRIEF KARAKTERISASI DAN PROPAGASI KULTIVAR LOKAL UNGGUL DURIAN (<i>DURIO ZIBETHINUS</i> MURR.) SULAWESI TENGAH	1
2	POLICY BRIEF BATAKO SLAG NIKEL	1
3	POLICY BRIEF PENGARUH PEMANGKASAN PUCUK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PAPRIKA (<i>CAPSICUM ANNUM</i> VAR. <i>GROSSUM</i> L.)	1
4	POLICY BRIEF PENGEMBANGAN METODE PENGENDALIAN KEONG INANG PERANTARA <i>SCHISTOSOMA JAPONICUM</i>	1
5	POLICY BRIEF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1
6	POLICY BRIEF RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1



PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN		
7	POLICY BRIEF PASCA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	1
JUMLAH		7

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) kajian yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah terkait inovasi.

Pertama *Policy Brief* karakterisasi dan Propagasi Kultivar Lokal Unggul Durian (*Durio Zibethinus* Murr.) Sulawesi tengah Menjelaskan Penelitian ini telah dilakukan dengan identifikasi secara morfologi dan genetika terhadap jenis/varietas/klon yang tumbuh alami di sentra produksi durian. Daerah tersebut meliputi beberapa daerah di Kab Parigi Motong dan beberapa daerah di Pantai barat Kab Donggala. Hasil observasi menunjukkan variasi yang sangat tinggi diantara durian lokal Sulawesi tengah dan mengindikasikan laju mutasi/evolusi yang tinggi yang terjadi di lapangan. Kondisi ini memberikan kemungkinan yang tinggi akan adanya plasma nuftah Durian asli asal Sulawesi Tengah yang berkualitas unggul.

Policy Brief Batako Slag Nikel menjelaskan pemanfaatan slag nikel sebagai bahan pengganti agregat dalam pembuatan batako memberikan hasil yang sangat baik dari segi kekuatan mekanis, ketahanan terhadap air, dan efisiensi material. Berdasarkan hasil uji, batako dengan komposisi slag nikel secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan batako konvensional.

Policy Brief Pengaruh Pemangkasan Pucuk Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Paprika (*Capsicum Annum* Var. *Grossum* L.) menjelaskan untuk membandingkan pertumbuhan dan produksi tanaman paprika akibat pemangkasan dan tidak dipangkas. Waktu pelaksanaan penelitian mulai bulan Maret hingga September 2024, bertempat di screen house Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan uji T sebagai uji lanjut. Perlakuan yang dikaji adalah pemangkasan pucuk dengan 2 (dua) taraf, yaitu P0 = tanpa



dipangkas dan P1 = dipangkas pucuk. Masing-masing perlakuan diulang 3 (tiga) kali dan setiap unit perlakuan menggunakan 5 (lima) sampel tanaman, sehingga total sebanyak 30 tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan pucuk pada tanaman paprika berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 6 hingga 10 MST, sedangkan jumlah cabang dan cabang produktif tidak memberikan pengaruh nyata. Pemangkasan pucuk hanya berpengaruh nyata terhadap diameter buah, namun tidak memberikan pengaruh nyata pada jumlah buah per tanaman dan berat buah per biji. Perlakuan pemangkasan pucuk pada tanaman paprika cenderung memiliki nilai lebih tinggi terhadap semua komponen pengamatan dibandingkan bila tidak dipangkas.

Policy Brief Pengembangan Metode Pengendalian Keong Inang Perantara Schistosoma Japonicum Menjelaskan Hasil penelitian ini menemukan kecenderungan kematian keong meningkat setelah Hari ke 7 pada habitat yang ditutup dengan plastic hitam disertai dengan penyemprotan menggunakan moluskisida dibandingkan hanya menutup habitat keong dengan plastik hitam saja, hal ini karena suhu lingkungan di daerah endemis Napu paling tinggi 37°C sehingga tidak mematikan keong yang hanya ditutup dengan plastik hitam, Pada suhu tinggi, plastik hitam kurang menyerap energi panas sinar matahari. (Yun et al., 2013) Suhu yang diperlukan untuk membunuh keong dalam beberapa jam yaitu 45°C.

policy brief Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Merumuskan perlu atau tidaknya melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air dan Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air.

Policy Brief Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan menjelaskan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan, dan Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait

dengan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Policy Brief Pasca *Focus Group Discussion* (FGD) Menjelaskan rancangan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan raperda tentang administrasi kependudukan.

Ketujuh *Policy Brief* Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan tentang kemampuan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

DATA INOVASI BERDASARKAN KATEGORI INOVATOR

NO.	KATEGORI	JUMLAH
1	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	3
2	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	3
3	ASN TERINOVATIF	3
4	MASYARAKAT (UMUM / MAHASISWA)	3
5	PELAJAR (SMP/SMA SEDERAJAT)	3
JUMLAH		15

Sumber : Data BRIDA 2025

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 15 inovasi yang berasal dari 5 kategori inovator. Kontribusi terbesar datang dari **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** dengan jumlah 3 inovasi, mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dari sektor pemerintahan. Diikuti oleh **Pimpinan Perangkat Daerah** terinovatif sebanyak 3 Perangkat Daerah, **Aparatur Sipil Negara (ASN)** Terinovatif sebanyak 3 ASN, **Pelajar tingkat SMP/SMA sederajat** dengan 3 inovasi, menunjukkan potensi besar generasi muda dalam pengembangan ide kreatif. Sementara itu, **masyarakat umum dan mahasiswa** turut menyumbangkan 3 inovasi, menandakan partisipasi aktif komunitas dalam mendorong solusi inovatif untuk berbagai permasalahan. Data ini menunjukkan bahwa ekosistem inovasi di daerah telah melibatkan beragam kalangan secara luas dan berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. INDEKS INOVASI DAERAH (IID)

Penganugerahan Inovasi Daerah

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pemberian penghargaan inovasi daerah sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2023 dan 2024 yang antara memberikan penghargaan dengan kriteria :

- ASN terinovatif
- Pimpinan Perangkat Daerah terinovatif
- Perangkat Daerah terinovatif
- Masyarakat terinovatif
- Pemerintah Daerah terinovatif

Adapun dasar penilaian tetap mengacu pada hasil penilaian kematangan inovasi daerah yang diupload melalui aplikasi :

<https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id>

yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI periode upload data 1 November 2024.

Para penerima penghargaan selanjutnya berhak menerima plakat dan uang tunai untuk pembinaan inovasi daerah di masing-masing unit kerja, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pemberian penghargaan diserahkan saat pelaksanaan Brida Innovation Week Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 21 - 23 November 2024 di Sriti Convention Hall Palu - Sulawesi Tengah



REKAPITULASI
KINERJA PENGELOLAAN INOVASI DAERAH SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

Rakapitulasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah

URAIAN		HASIL PENILAIAN
1. SKOR INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI	:	55,22
2. INDEKS RATA-RATA KOTA	:	55,91
3. INDEKS RATA-RATA KABUPATEN	:	38,75
4. RATA-RATA INOVASI PER DAERAH	:	16,85
5. SKOR TERTINGGI KOTA	:	55,91
6. SKOR TERTINGGI KABUPATEN	:	59,81
7. SKOR TERENDAH KABUPATEN	:	6,10

Rakapitulasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN		HASIL PENILAIAN
1. UPDATE PELAPORAN	:	25/11/2024 PUKUL 18,34 WIB
2. INOVASI YANG DILAPORKAN	:	26
3. INOVASI YANG DIKIRIM KE BSKDN	:	13
4. INISIATIF	:	0
5. UJI COBA	:	1
6. PENERAPAN	:	26
7. SKOR KEMATANGAN INOVASI DAERAH TERTINGGI	:	101
8. SKOR KEMATANGAN INOVASI DAERAH TERENDAH	:	82
9. TOTAL SKOR INDEKS KEMATANGAN INOVASI DAERAH YANG TERKIRIM	:	1.186
10. RATA-RATA SKOR INDEKS KEMATANGAN	:	91,23



Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per OPD (Inovator)

PERANGKAT DAERAH		TOTAL SKOR IID
1.	DINAS KESEHATAN :	340
2.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH :	214
3.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH :	200
4.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH :	184
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN :	168
6.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA :	149
7.	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH :	92
8.	DINAS PENDIDIKAN :	90
9.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL :	86
10.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA :	77
11.	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG :	74
12.	DINAS PERHUBUNGAN :	74
13.	DINAS KEHUTANAN :	47
14.	DINAS PERUMAHAN, KAWANSAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN :	0
15.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :	32

Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per PIMPINAN OPD (Inovator)

PERANGKAT DAERAH		TOTAL SKOR IID
1.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH :	194
2.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH :	184
3.	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH :	87
4.	UPT RSUD UNDATA :	86
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH :	86
6.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA :	77

Rekapitulasi Jumlah Usul Inovasi Daerah Per OPD

PERANGKAT DAERAH		JUMLAH INOVASI DAERAH
1.	DINAS KESEHATAN :	6
2.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH :	3
3.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH :	2
4.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH :	3
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN :	2
6.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA :	4
7.	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH :	2
8.	DINAS PENDIDIKAN :	3
9.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL :	1
10.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA :	1
11.	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG :	2
12.	DINAS PERHUBUNGAN :	1
13.	DINAS KEHUTANAN :	1
14.	DINAS PERUMAHAN, KAWANSAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN :	1
15.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :	1

Rekapitulasi Pencapaian Skor IID per ASN (Inovator)

APARATUR SIPIL NEGARA		TOTAL SKOR IID
1.	ARVANDI, ST.,MT :	139
2.	RENDY SETIAWAN, S.KOM :	101
3.	FATIM, SP., MM :	99
4.	FATMA A. DEU, SKM., M.SI :	90
5.	SULTANISAH :	86
6.	YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.KES :	86
7.	NUR MASITA M. ARDI, S.PI, M.SI :	82
8.	MUHAMMAD DONIKO IRWANA PUTRA, S. TR. :	74
9.	MUHAMMAD NASIR, SKM.,MAP :	52

10.	SUSANTO WIBOWO, S. HUT .,M.SI	:	47
11.	NOVAL ZAINUDDIN, ST., M.SI	:	26
12.	FRICE, S.SOS., M.SI	:	10
13.	SANTI DARMIATI,SST,MPH	:	6
14.	MUNASHIR, S.E., M.M	:	4

Rekapitulasi usul IID berdasarkan INISIATOR

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	ASN - Aparatur Sipil Negara	18	54,54%
2	OPD - Perangkat Daerah	15	45,45%

Rekapitulasi usul IID berdasarkan BENTUK

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	7	21,21%
2	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	20	60,60%
3	INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	6	18,18%

Rekapitulasi usul IID berdasarkan JENIS

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	TEKNOLOGI	5	15,15%
2	DIGITAL	17	51,51%
3	NON DIGITAL	11	33,33%

Rekapitulasi usul IID berdasarkan TAHAPAN

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	INISIATIF	2	6,06%
2	UJI COBA	5	15,15%
3	PENERAPAN	26	78,78%



Rekapitulasi skor IID PROVINSI se SULAWESI

PROVINSI		INDEKS INOVASI DAERAH
1. SULAWESI SELATAN	: 59,66	INOVATIF
2. SULAWESI TENGAH	: 55,22	INOVATIF
3. SULAWESI TENGGARA	: 51,36	INOVATIF
4. SULAWESI BARAT	: 49,5	INOVATIF
5. SULAWESI UTARA	: 37,51	KURANG INOVATIF
6. GORONTALO	: 34,68	KURANG INOVATIF

Rekapitulasi skor IID KAB/KOTA se SULAWESI TENGAH

PROVINSI		INDEKS INOVASI DAERAH
1. KABUPATEN BANGGAI	: 59,81	INOVATIF
2. KOTA PALU	: 55,91	INOVATIF
3. KABUPATEN TOJO UNAUNA	: 50,47	INOVATIF
4. KABUPATEN PARIGI MOUTONG	: 49,36	INOVATIF
5. KABUPATEN MOROWALI	: 45,89	INOVATIF
6. KABUPATEN BANGGAI LAUT	: 40,89	INOVATIF
7. KABUPATEN MOROWALI UTARA	: 39,99	INOVATIF
8. KABUPATEN TOLITOLI	: 39,81	INOVATIF
9. KABUPATEN SIGI	: 38,14	INOVATIF
10. KABUPATEN BUOL	: 34,55	KURANG INOVATIF
11. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	: 33,84	KURANG INOVATIF
12. KABUPATEN POSO	: 26,16	KURANG INOVATIF
13. KABUPATEN DONGGALA	: 6,1	KURANG INOVATIF





Rekapitulasi SKOR KEMATANGAN inovasi daerah SULTENG 2021 - 2024

NO	TAHUN	SKOR IID	PREDIKAT
1	TAHUN 2021	49,57	INOVATIF
2	TAHUN 2022	45,55	INOVATIF
3	TAHUN 2023	34,00	KURANG INOVATIF
4	TAHUN 2024	55,22	INOVATIF
5	TAHUN 2025	---	---

Rekapitulasi usul Inovasi Daerah per Tahapan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	PENERAPAN	UJI COBA	INISIATIF
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	0	1	0
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	2	2	0	0
3	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	2	1	0
4	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3	2	1	0
5	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	2	2	0	0
6	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	4	2	2	0
7	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	1	0	0
8	DINAS KEHUTANAN	1	1	0	0
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2	0	0
10	DINAS KESEHATAN	6	6	0	0
11	DINAS PENDIDIKAN	3	1	0	2
12	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	0	0
13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	1	0	0
14	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	1	0	0
15	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2	2	0	0





Rekapitulasi usul “Penerapan” Inovasi Daerah yang diteruskan ke BSKDN
Kemendagri di Aplikasi IGA

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USUL	YANG DITERUSKAN KE KEMENDAGRI RI
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	2	2
3	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	2	2
4	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	2
5	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	2	0
6	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	2	1
7	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	0
8	DINAS KEHUTANAN	1	0
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2
10	DINAS KESEHATAN	6	2
11	DINAS PENDIDIKAN	1	1
12	DINAS PERHUBUNGAN	1	0
13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	0
14	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	0
15	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2	1
JUMLAH		26	13

Daftar nominatif usul INOVASI DAERAH tahapan INISIATIF

NO	JUDUL INOVASI	OPD	SKOR IID
1	INTA : INTEGRATED TEACHERS DATA	DINAS PENDIDIKAN	4
2	MENINGKATKAN KUALITAS KETERAMPILAN SISWA SMK MELALUI PENERAPAN BLUD	DINAS PENDIDIKAN	0





Daftar nominatif usul INOVASI DAERAH untuk tahapan UJI COBA

NO	JUDUL INOVASI	OPD	SKOR IID
1	SILADMAS (SISTEM INFORMASI LAYANAN DAN DATA BASE ORMAS)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32
2	TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0
3	BRIDA TEPAT GUNA : PEMBINAAN REPLIKASI INOVASI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	20
4	DEMAM KEONG : DRAINASE TERBANGUN PREVALENSI SCHISTOSOMIASIS TURUN	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	0
5	E-BANTEKBGN : ELEKTRONIK BANTUAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG NEGARA	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	10

Daftar nominatif usul INOVASI DAERAH untuk tahapan PENERAPAN

NO	JUDUL INOVASI	OPD	SKOR IID
1	SIREVA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	101
2	E-REAL DEPOSIT	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	99
3	DESA SIAP GENCAR DAN AMAN STUNTING	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	93
4	GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	91
5	LABRIDA : LAMPU BAGANG PERANGKAP IKAN DENGAN SONAR	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	98
6	KAMPUNG KELAPA RAJA BRIDA : PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR MELALUI BUDIDAYA KELAPA GENJAH VARIETAS RAJA	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	96
7	SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG (SITARU)	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	48
8	SISTEM INFORMASI BINA JASA KONSTRUKSI (SIBIJAK)	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	26
9	PADUNGKU: PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTRIM TURUN	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	91
10	IRIGASIKU	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	48





11	SINERGI, BERSAHABAT & RAMAH LINGKUNGAN (STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	86
12	PENGELOLAAN REHABILITASI DAS TERTINTEGRITAS BERBASIS KOORDINASI DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR "E-REHAB DAS"	DINAS KEHUTANAN	47
13	SI PERLU : SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RUANG LAUT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82
14	PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK JADI BBM DAN PERABOT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	86
15	GEMPITA (GERAKAN MANGANDE PADONDO ANTE KITA)	DINAS KESEHATAN	87
16	APLIKASI SIMANIS "SISTEM INFORMASI MUTU RUMAH SAKIT"	DINAS KESEHATAN	90
17	PENGUATAN KOORDINASI LAYANAN PSC 119 DENGAN RUMAH SAKIT DI KOTA PALU	DINAS KESEHATAN	52
18	SISTEM INFORMASI DATA BASE DAN PETA SEBARAN FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	DINAS KESEHATAN	31
19	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI STANDAR PRODUK DAN USAHA MAKAN MINUM (DAM) BERDASARKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA UNTUK MENGURANGI RESIKO KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	39
20	OPTIMALISASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI MOU DENGAN DISDUKCAPIL DALAM PENCAPAIAN SKRINING ASIK DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	DINAS KESEHATAN	41
21	SIKOLA : TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KOMPETENSI LULUSAN	DINAS PENDIDIKAN	86
22	SIPANSUS DISHUB PROVINSI SULTENG PROGRAM PENDAFTARAN ONLINE KARTU ANGKUTAN SEWA KHUSUS (ASK)	DINAS PERHUBUNGAN	74
23	MENINGKATKAN MANAJEMEN KINERJA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERBASIS SISTEM INFORMASI PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0





PERMUKIMAN BANUATA (SIPERKIM BANUATA) DI SULAWESI TENGAH			
24	PETANI MISKIN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	77
25	SIMPLE ALREADY (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI REKAM MEDIK DIGITAL RESPONSIF SOSIAL DISTANCING)	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	6
26	TOL ALIMA	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	86

Daftar nominatif usul INOVASI DAERAH untuk tahapan PENERAPAN yang diteruskan BSKDN KEMENDAGRI melalui Aplikasi IGA

NO	JUDUL INOVASI	OPD	SKOR IID
1	SIREVA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	101
2	E-REAL DEPOSIT	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	99
3	DESA SIAP GENCAR DAN AMAN STUNTING	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	93
4	GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	91
5	LABRIDA : LAMPU BAGANG PERANGKAP IKAN DENGAN SONAR	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	98
6	KAMPUNG KELAPA RAJA BRIDA : PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR MELALUI BUDIDAYA KELAPA GENJAH VARIETAS RAJA	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	96
7	PADUNGKU: PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTREM TURUN	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA	91
8	SI PERLU : SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RUANG LAUT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82
9	PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK JADI BBM DAN PERABOT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	86
10	GEMPITA (GERAKAN MANGANDE PADONDO ANTE KITA)	DINAS KESEHATAN	87
11	APLIKASI SIMANIS "SISTEM INFORMASI MUTU RUMAH SAKIT"	DINAS KESEHATAN	90
12	SIKOLA : TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KOMPETENSI LULUSAN	DINAS PENDIDIKAN	86
13	TOL ALIMA	UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	86





LAMPIRAN

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH MELALUI KEGIATAN BRIDA INNOVATION WEEK TAHUN 2024

Kategori ASN Terinovatif

NO	KATEGORI	PERINGKAT	PENERIMA
1	ASN TERINOVATIF	TERINOVATIF 1	ARVANDI
2	ASN TERINOVATIF	TERINOVATIF 2	RENDI SETIAWAN
3	ASN TERINOVATIF	TERINOVATIF 3	FATIM

Kategori Pimpinan Perangkat Daerah Terinovatif

NO	KATEGORI	PERINGKAT	PENERIMA
1	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 1	KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 2	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 3	KEPALA DINAS KESEHATAN

Kategori Perangkat Daerah Terinovatif

NO	KATEGORI	PERINGKAT	PENERIMA
1	PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 1	DINAS KESEHATAN
2	PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 2	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3	PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF	TERINOVATIF 3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH





**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN NILAI TERTINGGI INDEKS
KEMATANGAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE SULAWESI
TENGAH TAHUN 2024**

NO	PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	PENERIMA
1	PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	PEMERINTAH KAB/KOTA TERINOVATIF 1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
2	PEMERINTAH KOTA PALU	PEMERINTAH KAB/KOTA TERINOVATIF 2	KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PALU
3	PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNAUNA	PEMERINTAH KAB/KOTA TERINOVATIF 3	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNAUNA



2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks daya saing daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik dalam negeri maupun luar negeri demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Secara singkat, daya saing sebuah entitas wilayah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktifitas di tiga lini ini yaitu (1) produktifitas dalam factor produksi ; (2) produktifitas yang didorong oleh efisien dan ; (3) produktifitas yang didorong oleh inovasi. Faktor pendorong produktifitas tersebut dituangkan dalam 4 komponen utama dan dijabarkan melalui 12 pilar daya saing.

Pada IDSD 2024, BRIN melakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik pada level indikator maupun pada metode pengukuran, seperti di Komponen 1 lingkungan pendukung dari 34 indikator berkurang menjadi 32 indikator; di komponen 3 pasar dari 12 indikator meningkat menjadi 14 indikator.



Indikator Setiap Pilar dalam Indeks daya saing daerah (IDSD)

Pilar 1 Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah melalui 6 (enam) dimensi dan 14 (empat belas) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Keamanan	1. Kejadian Pungutan Liar 2. Jumlah Kejadian Tingkat Pembunuhan* 3. Penangkapan Terduga Teroris 4. Keandalan Layanan Kepolisian
2. Modal Sosial	Modal Sosial
3. Check & Balances	1. Transparansi Anggaran 2. Kebebasan Pers 3. Sistem pemerintahan berbasis elektronik 4. Kinerja Instansi Pemerintah 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Transparansi	Upaya Pencegahan Korupsi
5. Hak atas Kepemilikan	1. Kejahatan terhadap Hak Atas Kepemilikan 2. Kualitas Administrasi Pertanahan
6. Orientasi Masa Depan Pemerintah	Tingkat Pengelolaan Lingkungan

Pilar 2 Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah melalui 6 (enam) dimensi dan 9 (sembilan) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Infrastruktur Transportasi (jalan darat)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan* 2. Kualitas Infrastruktur Jalan
2. Infrastruktur Transportasi (jalur kereta api)	Layanan Infrastruktur Kereta Api*
3. Infrastruktur Transportasi (Udara)	Layanan Infrastruktur Bandara*
4. Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	Layanan Infrastruktur Pelabuhan*
5. Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	1. Rasio Elektrifikasi 2. Susut Energi Listrik
6. Infrastruktur Utilitas (Air)	1. Akses Air Minum Layak 2. Tingkat Kehilangan Air

Pilar 3 Adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah melalui 1 (satu) dimensi dan 4 (empat) indikator.

Dimensi	Indikator
Adopsi TIK	1. Pengguna Telepon Seluler 2. Jangkauan Jaringan 4G 3. Pelanggan Internet Fixed-Broadband (per 100 penduduk)* 4. Pengguna Internet



Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro mengukur kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro melalui 1 (satu) dimensi dan 6 (enam) indikator.

Dimensi	Indikator
Kestabilan Ekonomi Makro	1. Inflasi 2. Kapasitas Fiskal Daerah 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5. Indeks Ketahanan Pangan 6. Nilai Investasi*



Pilar 5 Kesehatan mengukur "Harapan Hidup" yang disesuaikan dengan Kesehatan di daerah melalui 1 (satu) indikator.

Dimensi	Indikator
Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup



Pilar 6 Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah melalui 2 (dua) dimensi dan 7 (tujuh) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Tenaga kerja saat ini	1. Rata-rata tahun sekolah 2. Keterampilan lulusan 3. Keterampilan digital 4. Kemudahan menemukan pekerja terampil
2. Tenaga kerja masa depan	1. Angka harapan sekolah 2. Berfikir kritis dalam mengajar 3. Rasio murid-guru pendidikan dasar



t

Pilar 7 Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui 1 (satu) dimensi dan 2 (dua) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Persaingan domestik	1. Tingkat dominasi pasar 2. Persaingan sektor jasa

1. Tingkat dominasi pasar dihitung dengan membagi jumlah UKM dengan jumlah Industri Besar Sedang (ISB) di suatu daerah.
2. Persaingan sektor jasa → besarnya peranan sektor jasa di suatu daerah. Semakin besar akan semakin tinggi tingkat daya saingnya dihitung dari Location Quotient (LQ) sektor jasa suatu daerah

Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah melalui 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Fleksibilitas	1. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif 2. Upah pekerja
2. Meritokrasi dan insentif	Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki



Pilar 9 Sistem Keuangan mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah melalui 2 (dua) dimensi dan 5 (lima) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Kedalaman	1. Presentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku * 2. Nilai akad Kredit Usaha Rakyat * 3. Nilai pembiayaan Lembaga ventura kepada UMK/Start-up* 4. Presentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan menurut jenis jaminan *
2. Stabilitas	Rasio NPL terhadap total pinjaman*



Pilar 10 Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui 2 (dua) indikator.

Dimensi	Indikator
Ukuran pasar	1. PDRB ADHK 2010* 2. Presentase Nilai impor terhadap PDRB Harga Berlaku*



Pilar 11 Dinamisme Bisnis menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah melalui 1 (satu) dimensi dan 3(tiga) indikator.

Dimensi	Indikator
Persyaratan administrasi	1. Penomoran Nomor Induk Berusaha (NIB) * 2. Jumlah Bank * 3. Kinerja Pelayanan Publik*



Pilar 12 Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda; serta Kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 7 (tujuh) indikator.

Dimensi	Indikator
1. Keanekaragaman dan Kolaborasi	1. Keanekaragaman tenaga kerja 2. Status pengembangan klaster
2. Riset	1. Publikasi ilmiah 2. Aplikasi kekayaan intelektual (KI)* 3. Belanja riset 4. Indeks keunggulan lembaga riset
3. Komersialisasi	1. Aplikasi merk dagang

*Kekayaan Intelektual: paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan rahasia dagang.



Score IDSD 2024 secara Nasional & Regional se-Sulawesi

No.	PROVINSI	IDSD 2024
NASIONAL		3.43
1	DKI JAKARTA	4.09
2	DI YOGYAKARTA	3.97
3	BALI	3.91
4	JAWA BARAT	3.88
5	JAWA TIMUR	3.88
6	BANTEN	3.87
7	JAWA TENGAH	3.84
8	SUMATRA UTARA	3.71
9	SUMATRA BARAT	3.70
10	SULAWESI SELATAN	3.61
11	GORONTALO	3.58
12	KALIMANTAN SELATAN	3.56
13	SULAWESI UTARA	3.53
14	NUSA TENGGARA BARAT	3.50
15	ACEH	3.49
16	BENGKULU	3.48
17	SUMATRA SELATAN	3.46
18	LAMPUNG	3.46
19	KALIMANTAN TENGAH	3.46
20	KALIMANTAN BARAT	3.42
21	NUSA TENGGARA TIMUR	3.41
22	SULAWESI TENGGARA	3.43
23	MALUKU	3.43
24	RIAU	3.40
25	JAMBI	3.38
26	KEP.BANGKA BELITUNG	3.37
27	KALIMANTAN TIMUR	3.37
28	RIAU	3.35
29	SULAWESI TENGAH	3.30
30	KALIMANTAN UTARA	3.26
31	SULAWESI BARAT	3.24
32	MALUKU UTARA	3.23
33	PAPUA BARAT DAYA	3.15
34	PAPUA	2.97
35	PAPUA BARAT	2.87
36	PAPUA SLATAN	2.78
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.57
38	PAPUA TENGAH	2.46

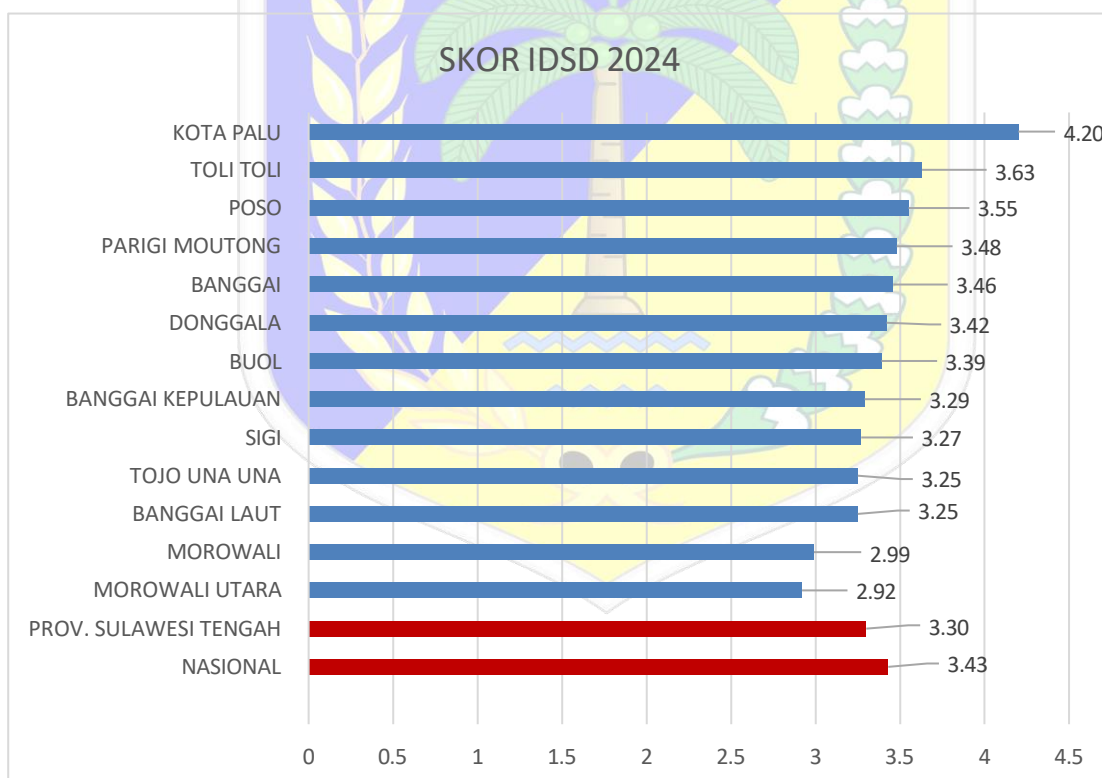
No.	PROVINSI	IDSD 2024
NASIONAL		3.43
1	SULAWESI SELATAN	3.61
2	GORONTALO	3.58
3	SULAWESI UTARA	3.53
4	SULAWESI TENGGARA	3.43
5	SULAWESI TENGAH	3.30
6	SULAWESI BARAT	3.24

Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang dilakukan oleh BRIN, dilihat **Secara nasional** score IDSD 2024 Sulawesi Tengah berada di posisi ke 29 dari 38 provinsi dengan *score* sebesar 3,30 berada dibawah *score* nasional sebesar 3,43.

Sedangkan **Secara regional se-Sulawesi** *score* IDSD Sulawesi Tengah berada di posisi ke 5 dari 6 provinsi.

Skor IDSD 2024 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD 2024
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4.18	2.97	3.47	3.99	3.76	3.91	2.57	3.03	2.76	4.35	3.06	3.13	3.43
PROV. SULTENG	4.27	2.52	3.21	4.07	3.69	4.25	2.43	2.94	2.16	4.65	2.71	2.72	3.30
RATA-RATA KAB/KOTA	4.25	2.91	3.62	3.61	3.64	4.06	4.30	3.33	2.08	4.04	3.38	1.49	3.39
MOROWALI UTARA	3.82	2.99	3.55	3.27	3.75	4.10	1.96	2.27	0.80	4.28	3.77	0.50	2.92
MOROWALI	4.14	2.61	3.47	3.65	3.70	4.11	0.51	3.27	1.46	5.00	3.15	0.82	2.99
BANGGAI LAUT	4.14	2.82	3.35	3.07	3.43	3.89	5.00	3.86	2.26	3.34	3.52	0.36	3.25
TOJO UNA UNA	4.39	2.61	3.37	3.73	3.45	3.88	5.00	3.07	1.68	3.71	3.21	0.85	3.25
SIGI	4.09	3.10	3.57	3.95	3.78	4.06	5.00	2.77	1.08	3.94	2.41	1.54	3.27
BANGGAI KEPULAUAN	4.43	2.56	3.10	3.01	3.49	4.14	5.00	3.55	2.10	3.57	3.27	1.23	3.29
BUOL	4.44	2.59	3.44	3.63	3.73	4.03	4.88	3.56	2.42	3.73	3.28	1.00	3.39
DONGGALA	3.90	3.07	3.57	3.52	3.58	3.82	5.00	3.02	2.69	4.07	3.53	1.23	3.42
BANGGAI	4.58	2.9	3.53	3.02	3.84	4.06	3.58	3.73	2.15	4.43	3.57	2.08	3.46
PARIGI MOUTONG	4.60	3.25	3.68	4.12	3.31	4.11	5.00	2.99	1.48	4.20	3.49	1.53	3.48
POSO	4.26	2.85	3.85	3.91	3.86	4.28	5.00	2.77	2.57	3.95	3.36	1.99	3.55
TOLI TOLI	4.29	2.67	3.96	3.79	3.49	4.09	5.00	4.31	2.06	3.89	3.73	2.28	3.63
KOTA PALU	4.22	3.80	4.62	4.28	3.88	4.20	5.00	4.10	4.23	4.36	3.69	3.96	4.20



Dalam perspektif kabupaten/kota IDSD 2024, capaian IDSD tertinggi berada di Kota Palu dengan score sebesar 4,20, sedangkan score IDSD terendah berada di Kabupaten Morowali sebesar 2,99 lalu menyusul terendah Morowali Utara sebesar 2,92.



Capaian Score IDSD 2023-2024 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

No.	PROV. SULTENG	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	Skor IDSD
1	2023													
	Nasional	4.30	2.71	5.58	3.54	3.79	3.77	2.64	3.85	2.53	4.36	3.22	3.03	3.44
	Sulawesi Tengah	3.92	1.94	2.88	3.62	3.66	3.77	3.34	3.96	2.18	4.41	2.89	2.47	3.25
2	2024													
	Nasional	4.18	2.97	3.47	3.99	3.76	3.10	2.57	3.03	2.76	4.35	3.06	3.13	3.43
	Sulawesi Tengah	4.27	2.52	3.21	4.07	3.69	4.25	2.43	2.94	2.16	4.65	2.71	2.72	3.30

Berdasarkan hasil nilai skor IDSD tahun 2024 Sulawesi Tengah, nilai skor terendah berada pada komponen SDM yaitu pada pilar 7 Pasar Produk (2,43) dan pilar 8 Pasar Tenaga Kerja (2,94); Komponen Pasar yaitu pada pilar 9 Sistem Keuangan (2,16) dan; Komponen Ekosistem Inovasi yaitu pada pilar 12 Kapabilitas Inovasi (2,72), namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 skor pilar 12 ini mengalami peningkatan dari skor 2,47 di tahun 2023 meningkat menjadi 2,72 di tahun 2024. Uraian pilar terendah sbb:

- Pilar 7 Pasar Produk (2,43) mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Indikator pilar 7 terdiri dari: Tingkat Dominasi Pasar. (sumber data Kementerian Perindustrian & BPS); Tingkat Persaingan Sektor Usaha (sumber data BPS).
- Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja (2,94). Pasar tenaga kerja yang efisien dan system pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja. Indikator pilar 8 ini yaitu: Kebijakan pasar tenaga kerja (*BPS); Upah Pekerja (*BPS); Mobilitas



pekerja antar provinsi* (*BPS); Mobilitas pekerja dalam provinsi (*BPS); Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki (*BPS).

- Pilar 9 Sistem Keuangan (2,16) terdiri dari institusi, pasar, infrastruktur, serta regulasi yang menjamin kelancaran aktivitas simpan pinjam (Gunadi et al.,2013). Indikator dalam pilar 9 ini meliputi ; Kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (*OJK & BPS); Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat /KUR (*Kementerian Keuangan); Pembiayaan lembaga ventura kepada UMKM/start-up*(*OJK); Premi Asuransi Jiwa dan non jiwa (*OJK); Rasio Kredit Bermasalah terhadap total pembiayaan* (*OJK).
- Pilar 12 Kapabilitas Inovasi (2,72). Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indikator pilar 12 ini yaitu: Keanekaragaman tenaga kerja (*BPS); Pengembangan kluster (*Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi; Publikasi Ilmiah (Kemendikbudristek, BRIN, BKN); Belanja Riset (*Kemendagri, Kemenperin & Kemendikbudristek); Indeks keunggulan lembaga riset (*Kemendikbudristek); Aplikasi merek dagang (*Kemendikbudristek, Kemenkum HAM).

Ada 4 Pilar yang **kuat** berada diposisi lebih tinggi dari pada skor nasional yaitu :

- 1) Pilar 1 Institusi: Keamanan, Modal Sosial, Transparansi, Hak Atas Kepemilikan, Orientasi Masa Depan Pemerintah;
- 2) Pilar 4 Stabilitas Ekonomi: Inflasi, Kapasitas Fiskal Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi;
- 3) Pilar 6 Ketrampilan: Tenaga Kerja Saat Ini, Tenaga Kerja Masa Depan;
- 4) Pilar 10 Ukuran Pasar: PDRB, Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Sedangkan Pilar **yang lemah** atau yang skornya dibawah rata-rata nasional 8 Pilar:

- 1) Pilar 2 Infrastruktur: Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Utilitas Kelistrikan, Infrastruktur Utilitas Air;

- 2) Pilar 3 Adopsi TIK: Pengguna Telepon Seluler, Jangkauan jaringan 4G, Pelanggan Internet Fixed-broadband, Pengguna Internet;
- 3) Pilar 5 Kesehatan: Angka Harapan Hidup;
- 4) Pilar 7 Pasar Produk: Tingkat Dominasi Pasar, Persaingan Sektor Jasa;
- 5) Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja: Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif, Upah Pekerja, Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki;
- 6) Pilar 9 Sistem Keuangan Produk: Kredit Usaha Rakyat per penduduk, Pembiayaan Lembaga Ventura kepada UMKM/Start-up, Rasio Kredit Bermasalah terhadap Total Pinjaman;
- 7) Pilar 11 Dinamisme Bisnis: Biaya untuk Memulai Usaha, Waktu untuk Memulai Usaha;
- 8) Pilar 12 Kapabilitas Inovasi: Keanekaragaman tenaga kerja, Status Pengembangan klaster, Publikasi ilmiah, Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), Belanja Riset, Indeks Keunggulan Lembaga Riset, Aplikasi Merek Dagang.

SKOR IDSD TAHUN 2023 - 2024 PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	PROV.SULTENG	Pilar1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SCORD
1	2023	3.92	1.94	2.88	3.62	3.66	3.77	3.34	3.96	2.18	4.41	2.89	2.47	3.25
2	2024	4.27	2.52	3.21	4.07	3.69	4.25	2.43	2.94	2.16	4.65	2.71	2.72	3.30

Dilihat dari tahun sebelumnya score IDSD Sulteng lebih tinggi dibanding tahun 2023 (3,25). Ada 8 pilar yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu :

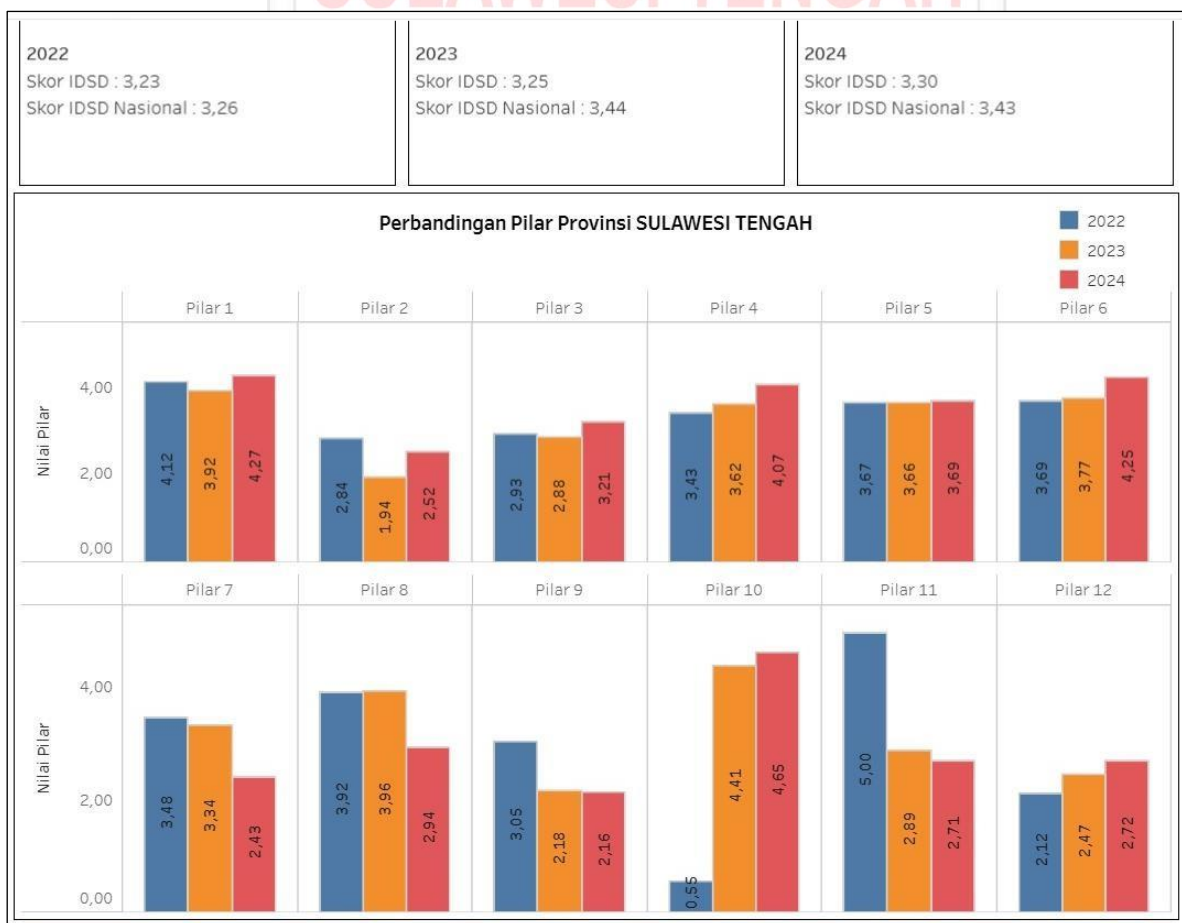
- 1) Pilar 1 Intitusi;
- 2) Pilar 2 Infrastruktur;
- 3) Pilar 3 Adopsi TIK;
- 4) Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Mkro;
- 5) Pilar 5 Kesehatan;
- 6) Pilar 6 Keterampilan;

- 7) Pilar 10 Ukuran Pasar dan Pilar;
- 8) Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

Ada 4 pilar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni :

- 1) Pilar 7 Pasar Produk;
- 2) Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja;
- 3) Pilar 9 Sistem Keuangan Produk.

Persandingan IDSD 2022 - 2024 Provinsi Sulawesi Tengah



BAB V PENUTUP

Buku BRIDA dalam Angka ini disusun sebagai bentuk penyajian data dan informasi mengenai capaian kinerja, kegiatan riset, inovasi, serta pengelolaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pemangku kepentingan dalam memahami perkembangan riset dan inovasi daerah secara kuantitatif.

Melalui penyajian data yang akurat, terkini, dan komprehensif, BRIDA dalam Angka diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dan potensi riset serta inovasi di daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan, pengolahan, dan verifikasi data sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Meskipun telah dilakukan upaya maksimal untuk menyajikan data yang lengkap dan akurat, penyusun menyadari masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan BRIDA dalam Angka pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan riset dan inovasi daerah, serta menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan.



PEMROV SULTENG
BRIDA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Brida.Sulteng



BridaProvSulteng



brida.sultengprov.go.id